

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, DANA ALOKASI UMUM, DANA
ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, BELANJA BARANG DAN
JASA, KEMANDIRIAN DAERAH DAN KETERGANTUNGAN FISKAL
TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

KINTAN SISILIAWATI PRITA INDRIANI
B200160335

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH BELANJA PEGAWAI, DANA ALOKASI UMUM, DANA
ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, BELANJA BARANG DAN
JASA, KEMANDIRIAN DAERAH, KETERGANTUNGAN FISKAL
TERHADAP BELANJA MODAL
(Studi Empiris Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

KINTAN SISILIAWATI PRITA INDRIANI
B200160335

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Noer Sasongko, S.E., Akt., M.Si.

NIDN. 0612056501

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, BELANJA BARANG DAN JASA, KEMANDIRIAN DAERAH DAN KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018)

Yang Ditulis Oleh:

KINTAN SISILIAWATI PRITA INDRIANI

B200160335

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 12 Februari 2020

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dr. Noer Sasongko, S.E., Akt., M.Si. (.....) (Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Wahyono, M.A., Akt. (.....) (Anggota I Dewan Penguji)
3. Eko Sugiyanto, S.E., M. Si. (.....) (Anggota II Dewan Penguji)

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 13 Februari 2020

Penulis



Kintan Sisiliawati

B200160335

PENGARUH BELANJA PEGAWAI, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, BELANJA BARANG DAN JASA, KEMANDIRIAN DAERAH, DAN KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah ada tidaknya pengaruh Belanja Pegawai, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Barang dan Jasa, Kemandirian Daerah, dan Ketergantungan Fiskal terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji f. Hasil pengujian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Belanja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Ketergantungan Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : Dana Perimbangan, Belanja, Ketergantungan Fiskal, Kemandirian Daerah, Belanja Modal.

Abstract

The purpose of this study is the presence or absence of the influence of Employee Expenditure, General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Revenue Sharing (DBH), Goods and Services Expenditures, Regional Independence, and Fiscal Dependence on the allocation of Capital Expenditures in Regencies / Cities in Indonesia in 2018. This study uses secondary data in the form of Realization of District / City Government Budget in Indonesia in 2018. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression analysis with t test, f test. The results of this test indicate that the General Allocation Fund (DAU) has a significant effect on Capital Expenditures, the Special Allocation Fund (DAK) has a significant effect on Capital Expenditures, Revenue Sharing Funds (DBH) have a significant effect on Capital Expenditures, Employee Expenditures have a significant effect on Capital Expenditures, Fiscal Dependency significantly influence Capital Expenditure, Goods and Services Expenditure significantly influence Capital Expenditures, and Regional Independence significantly influence Capital Expenditures.

Keywords: Balance Funds, Government Expenditures, Fiscal Dependence, Independence, Capital Expenditures

1. PENDAHULUAN

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah reformasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kewenangan penuh pemerintah daerah Kabupaten/Kota tanpa campur tangan Pemerintah Pusat biasa disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Menurut Mariun (1979) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Sedangkan menurut Vincent Lemius (1986) bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rancangan keuangan tahunan yang dirancang setiap tahun dengan tujuan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja sesuai rencana dan dialokasikan sesuai rencana. APBN 2019 disusun dengan tujuan investasi dan daya saing yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dengan harapan kebijakan fiskal mampu merespon dinamika volatilitas global dan pencapaian target pembangunan secara optimal.

Salah satu Dana Perimbangan adalah DAU yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 33 tahun 2004 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dari pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang didapat untuk membiayai belanja modal. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU dan diperhtungkan oleh pemerintah daerah ke dalam APBD.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi menjadi dua yaitu DAK Fisik dan DAK Non-fisik, DAK Non-Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus non-fisik daerah guna untuk meningkatkan pelayanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus fisik daerah sebagai prioritas Nasional untuk meningkatkan infrastruktur daerah. Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan dana dari APBN yang dialoksikan ke daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam kegiatan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH BELANJA PEGAWAI, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, BELANJA BARANG DAN JASA, KEMANDIRIAN DAERAH DAN KETERGANTUNGAN FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL.”

2. METODE

2.1 Populasi, Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di indonesia tahun 2018 yang terdiri dari 459 Kabupaten/Kota. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi dengan menggunakan kriteria tertentu. Sehingga didapatkan 396 sampel dari 459 populasi.

Kriteria–kriteria yang ditentukan adalah :

- 1.) Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018.
- 2.) Kabupaten/Kota di Indonesia yang menyediakan seluruh data informasi secara lengkap pada tahun 2018.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK RI pada tahun 2018 yang dapat diakses melalui laman web resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu www.djpk.depkeu.go.id

Tabel 1 Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia	(459)
2.	Kabupaten/Kota di Indonesia yang tidak menyediakan data dan informasi secara lengkap tahun 2018	(49)
	Situs resmi yang tidak dapat diakses	(14)
	Jumlah observasi keseluruhan yang disajikan sampel penelitian	396
	Data Outlier	0
	Jumlah subyek yang digunakan untuk analisis	396

Sumber: Data diolah, 2020

2.2 Variabel dan Pengukuran Variabel

2.2.1 Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dihitung dengan menambahkan semua indikator belanja modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,} \\ & \text{Irigasi dan Jaringan} + \text{belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

2.2.2 Belanja Pegawai

Di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelaskan bahwa belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah.

Belanja Pegawai = Belanja Pegawai Langsung + Belanja Pegawai Tidak Langsung

2.2.3 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2.4 Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang merupakan urusan daerah. DAK masing-masing daerah dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBD (Ardhani, 2011)

2.2.5 Dana Bagi Hasil

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Di dalam UU No 33 Tahun 2004 pendapatan dana perimbangan dibagi menjadi tiga salah satunya dana bagi hasil yang merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kebutuhan daerah tersebut dalam rangka kegiatan desentralisasi.

2.2.6 Belanja Barang dan Jasa

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang barang dan jasa bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

$$\text{Belanja Barang dan Jasa} = \frac{\text{Realisasi Belanja Barang dan Jasa}}{\text{dibandingkan dengan Total Pendapatan}}$$

2.2.7 Kemandirian Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

2.2.8 Ketergantungan Fiskal

Ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten, sedangkan pemerintah daerah kota/kabupaten merupakan titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ironisnya lagi dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (*governance*).

$$\text{Ketergantungan Fiskal} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2.3 Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mempengaruhi pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Metode regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja barang dan jasa, kemandirian daerah dan ketergantungan fiskal terhadap belanja modal kabupaten/kota di Indonesia

tahun 2018. Sehingga analisis regresi linier berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$BM = \alpha + \beta_1 BP + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + \beta_5 BBJ + \beta_6 KD + \beta_7 KF + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan

BM	: Belanja Modal
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$	: Koefisien variabel independen
BP	: Belanja Pegawai
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
BBJ	: Belanja Barang dan Jasa
KD	: Kemandirian Daerah
KF	: Ketergantungan Fiskal
ε	: <i>Error Term</i>

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2 Deskripsi Data Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	396	215,83	1237,97	607,4769	194,25081
DAK	396	0,72	427,55	186,6288	79,86267
DBH	396	6,36	564,53	66,4780	84,82036
BP	396	69,44	1265,81	439,2247	219,13739
KF	396	0,00	1,00	0,5247	0,09464
BBJ	396	28,64	759,52	293,8485	122,66650
KD	396	0,00	0,86	0,1317	0,11250
BM	396	30,20	531,81	231,0453	86,42735

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 396 sampel. Data menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota pada tahun 2018 rata – rata sebesar 607,4769 miliar rupiah dengan jumlah DAU terendah adalah sebesar 215,83 miliar rupiah dengan standar deviasi sebesar 194,25081 miliar rupiah dari rata – rata. DAU merupakan dana transfer yang diberikan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna untuk meningkatkan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan yang bersifat khusus yang masih merupakan urusan daerah tersebut sesuai prioritas nasional. Berdasarkan tabel diatas Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai nilai rata – rata sebesar 186,6288 miliar rupiah, dengan nilai tertinggi 427,65 miliar rupiah dan nilai standar deviasi sebesar 79,86267 miliar rupiah dari rata – rata.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka kegiatan desentralisasi. Berdasarkan tabel diatas Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai nilai rata – rata sebesar 66,4780 miliar rupiah, dengan nilai tertinggi sebesar 564,53 miliar rupiah, dengan nilai standar deviasi sebesar 84,82036 miliar rupiah dari rata – rata.

Belanja Pegawai digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, honorarium, lembur ataupun kontribusi sosial. Dari tabel diatas Belanja Pegawai mempunyai nilai rata – rata sebesar 439,2247 miliar rupiah, dengan nilai tertinggi sebesar 1265,81 miliar rupiah, dengan nilai terendah sebesar 69,44 miliar rupiah, dengan standar deviasi sebesar 219,13739 miliar rupiah dari rata – rata.

Ketergantungan Fiskal adalah kemampuan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Dari tabel diatas Belanja Barang dan Jasa mempunyai nilai rata – rata sebesar 293,8485 miliar rupiah, dengan nilai tertinggi sebesar 759,52 miliar rupiah, dan nilai tersendah sebesar 28,64 miliar rupiah, dengan standar deviasi sebesar 122,66650 miliar rupiah dari rata – rata.

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi kebutuhan daerah.

Belanja Modal Belanja Modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) belanja modal sendiri adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dari tabel diatas Belanja Modal mempunyai nilai rata – rata sebesar 231,0453 miliar rupiah, dengan nilai tertinggi sebesar 531,81 miliar rupiah, dan nilai terendah sebesar 30,20 miliar rupiah , dengan standar deviasi sebesar 86,42735 miliar rupiah dari nilai rata – rata.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Model	Kolmogorov - Smirnov	Probability (p)	Kriteria
<i>Unstandardized Residual</i>	1,188	0,119	P > 0,05

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2020

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data variabel yang digunakan dalam penelitian sudah terdistribusi normal (Sekaran & Bougie 2013). Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel-variabel penelitian memiliki distribusi normal. Penelitian dapat menggunakan uji *one-sample kolmogorov-smirnov*.

Dari hasil perhitungan uji kolmogorov smirnov , dapat diketahui bahwa *p-value* dari *Unstandardized Residual* lebih besar dari 0,05 , sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collonearity Statistics	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
DAU	0,203	4,915
DAK	0,409	2,448
DBH	0,609	1,641
BP	0,216	4,633
KF	0,464	2,157
BBJ	0,506	1,975
KD	0,715	1,398

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2020

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* menunjukkan lebih dari 0,1 ($>0,1$) dan memiliki *VIF* kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian ini tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi.

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Kriteria	<i>p-value</i>
DAU	$>0,05$	0,728
DAK	$>0,05$	0,851
DBH	$>0,05$	0,199
BP	$>0,05$	0,317
KF	$>0,05$	0,556
BBJ	$>0,05$	0,376
KD	$>0,05$	0,302

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2020

Dari hasil uji diatas nilai signifikansi lebih besar dari p-value ($> 0,05$), maka dapat dikatakan bahwa dalam pengujian ini tidak ada masalah heteroskedastisitas.

3.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Analisis regresi berganda ini untuk menguji pengaruh DAU, DAK, DBH, BP, KF, BBJ, KD terhadap Belanja Modal.

Tabel 6 Hasil Analisis Linier Berganda

Model	B	Std. Error	T	Sig
constant	-71,622	23,521		
DAU	0,119	0,026	4,585	0,000
DAK	0,382	0,045	8,580	0,000
DBH	0,233	0,034	6,783	0,000
BP	-,135	0,022	-6,031	0,000
KF	116,638	35,268	3,307	0,001
BBJ	0,388	0,026	14,890	0,000
KD	210,174	23,880	8,801	0,000
R	0,855		Fhitung	151,231
Rsquare	0,732		Sig	0,000
Adjusted R Square	0,727			

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21, 2020

Hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$BM = -71,622 + 0,199 \text{ DAU} + 0,382 \text{ DAK} + 0,233 \text{ DBH} - 0,135 \text{ BP} + 166,638 \text{ KF} + 0,388 \text{ BBJ} + 210,174 \text{ KD}$$

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor – faktor yang mempengaruhi alokasi Belanja modal terhadap dana alokasi umum, dana

alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja pegawai, ketergantungan fiskal, belanja barang dan jasa, dan kemandirian daerah pada Kabupaten/Kota seluruh Indonesia pada periode penelitian Tahun Anggaran 2018. Maka dari pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, H_1 diterima, (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, H_2 diterima, (3) Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal, H_3 diterima, (4) Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Belanja Modal, H_4 diterima, (5) Ketergantungan fiskal berpengaruh terhadap Belanja Modal, H_5 diterima, (6) Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Belanja Modal, H_6 diterima, (7) Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, H_7 diterima.

4.2 Saran

Adapun saran dari penulis adalah (1) peneliti selanjutnya dapat menambah rentang periode tahun anggaran, (2) peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 14 No. 1 Juni 2016.
- Wandira Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Jurnal 2 (1). ISSN 2251-6765.
- Zeatifani Desi., Abdullah Syukriy. 2018. Pengaruh SiLPA Dan Ketergantungan Fiskal Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera Dengan Klasifikasi Pemerintah Daerah Sebagai Pembeda. Jurnal JIMEKA Vol. 3, No. 4 2018. E-ISSN 2581-1002.
- Yusuf Mohammad. 2018. Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Hibah Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Modal : Panel Data 12 Kabupaten Kota Di Sumatera Utara. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 4 No. 1 Januari 2018. ISSN 2527-2772.
- Sujarweni V Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.

Aryani Putri Retno. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.